



RENCANA KERJA (RENJA)

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TA. 2021**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
JL. RAYA HAJIMENA, KEC. NATAR
LAMPUNG SELATAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang mengacu kepada RKPD dan memuat kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh SKPD terkait.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 merupakan perwujudan kewajiban Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung untuk menyusun dan menata rencana kerja perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 dan merupakan tahapan guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2021.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD ini dibuat, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Hajimena, Februari 2020

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**



Hi. KHERLANI, SE., MM

Pembina Utama

NIP. 19620504 198103 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 dan Capaian Renja Terhadap Renstra	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3 Isu – isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD	24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Pembangunan.....	27
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Tujuan Perangkat Daerah.....	28
3.2. Sasaran Perangkat Daerah.....	28
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
.....	29
BAB IV. PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan Rencana Pembangunan jangka Panjang/RPJP – Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP-Daerah dan memperhatikan RPJM-Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah/ RKP Daerah, merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

Keterkaitan antara Renja Kementerian dan Renja Provinsi/Kabupaten adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Sedangkan Penjabaran dari RPJM Daerah bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dalam bentuk Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra –SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Penjabaran dari Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD) yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Setelah tersusun Renja SKPD, maka dibuatlah Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang merupakan salah satu dokumen penganggaran, terdiri dari rencana kerja dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja dimaksud. Pada rencana kerja berisikan informasi mengenai input, output dan outcome program dan kegiatan yang akan dicapai tapi belum disepakati dan disahkan oleh Kepala Daerah sebagai dokumen pelaksana anggaran. Kemudian setelah RKA tersusun, ditetapkan dalam DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) yang merupakan salah satu dokumen penganggaran untuk acuan pelaksanaan anggaran yang berisikan informasi mengenai input, output program dan kegiatan yang akan di capai dan yang sudah disahkan oleh Kepala Daerah sebagai dokumen pelaksana anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2021 merupakan perwujudan kewajiban Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung untuk menyusun dan menata rencana kerja berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 dan merupakan tahapan guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2021.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJP dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD menggambarkan dalam penyusunan RKPD/dokumen perencanaan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsistensi perencanaan dan penganggaran harus menjadi pijakkan bagi setiap SKPD dalam menyusun dokumen RENJA. Program dan kegiatan yang dimuat dalam RENJA harus konsisten dengan isi Renstra, sehingga nantinya

tidak akan muncul program atau kegiatan baru diluar Renstra sebagaimana fenomena yang masih banyak terjadi selama ini.

Berangkat dari kondisi tersebut di atas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung bermaksud untuk menyempurnakan penyusunan Renja Tahun 2021 menyesuaikan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk membuat rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Lampung dan RENSTRA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung 2019 – 2024 sebagai pedoman penyusunan RKA dan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2021.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tahun 2021.
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tahun 2021.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan SKPD serta pengawasan selama periode 1 (Satu) tahun.

1.4 Sistematika Dokumen Renja

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renja terhadap Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Rumusan Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 (Matrik/Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan Indikatif, Lokasi, Indikator, Target dan Prakiraan Maju) dengan nomenklatur sesuai Renstra OPD Tahun 2019-2024
- 4.2 Matrik Hasil Pemetaan Nomenklatur yang mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 dan Capaian Renja Terhadap Renstra

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan renja tahun 2019 sebagaimana terlampir.

TABEL 2.1 Evaluasi Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renja Terhadap Renstra

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Terhadap Renstra	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2019 Terhadap Renstra (%)
Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi aparatur	I.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan profesional				99,15		91,65
		1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Formal/bimtek/ kursus	278 Orang	33 orang	33 orang	100	184 orang	66,19
		2.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Jumlah peserta yang mengikuti diklatpim IV	160 Orang	40 orang	40 orang	100	159 orang	99,34
		3.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Prajabatan	200 orang	80 orang	80 orang	100	199 orang	99,55
		4.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung	Jumlah peserta yang mengikuti diklatpim III	195 orang	80 orang	73 orang	91,25	351 orang	109,70
		5.	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi	320 orang	60 orang	60 orang	100	90 orang	42,86
		6.	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi	210 orang	30 orang	30 orang	100	60 orang	28,57
		7.	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Penunjang	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi	210 orang	60 orang	60 orang	100	180 orang	85,71
		8.	Pengembangan Kompetensi Umum	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi	240 orang	120 orang	120 orang	100	210 orang	87,50
		9.	Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi	210 orang	90 orang	90 orang	100	150 orang	71,43
		10.	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi	304 orang	160 orang	160 orang	100	284 orang	93,42
		11.	Diklat Prajabatan Golongan III CASN di Ling-kungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Lampung	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	1120 orang	2228 orang	2215 orang	99,42	2507 orang	223,80
		II.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					100		44,71
		1.	Penerbitan Majalah/ Buletin Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung	Jumlah buletin/majalah ilmiah Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung	2.020 exemplar	240 ekslemplar	240 ekslemplar	100	1.673 ekslemplar	82,82

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Terhadap Renstra	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2019 Terhadap Renstra (%)
		2.	Lembaga Sertifikasi Profesi	Pelaksanaan uji kompetensi	1.082 Orang	30 Orang	30 Orang	100	272 Orang	25,14
		3.	Komite Penjamin Mutu Diklat	Jumlah pelaksanaan penjaminan mutu diklat	43 Kab/ Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	100	19 kab/kota	44,19
		4.	Peningkatan Kemampuan Penelitian Widyaiswara	Jumlah pelaksanaan karya tulis ilmiah dan sosialisasi	60 Kali	1 Kali	1 Kali	100	16 Kali	26,67
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi	1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan administrasi Perkantoran				100		89,01
		1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran telepon, air/ PDAM dan listrik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	100
		2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran honor tim pengadaan barang jasa, tim pemeriksa barang jasa, pengelola keuangan SKPD, tim pengurus barang	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	100
		3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran Honor cleaning service	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	100
		4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembelian alat tulis kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	100
		5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	100
		6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian alat listrik/ elektronik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	100
		7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	100
		8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	100
		9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembelian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	100
		10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelaksanaan penyediaan makanan dan minuman rapat/seminar	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	100
		11.	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi luar daerah	230 kali	25 kali	25 kali	100	152 kali	66,09
		12.	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	250 kali	35 kali	35 kali	100	174 kali	69.60
		13.	Pameran dan Promosi Pembangunan	Pelaksanaan pameran dan pawai kendaraan	5 Paket	2 Paket	2 Paket	100	4 Paket	80
		14.	Penyediaan Bahan Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan	Jumlah bahan Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	60 bulan	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019	Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Terhadap Renstra	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2019 Terhadap Renstra (%)
		II.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan realisasi anggaran per-semester dan laporan keuangan akhir tahun				100		94,24
		1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang akurat	81 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	67 Dokumen	82,72
		2.	Penyusunan Renstra	Jumlah Dokumen Renstra	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
		3.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD-ILPPD, Laporan evaluasi program diklat, Evaluasi hasil renja SKPD dan Laporan capaian kinerja bulanan, triwulanan, semesteran	160 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	100	160 Dokumen	100
		III.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana diklat aparatur yang memadai				100		70,12
		1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	842 unit	39 Unit	39 Unit	100	173 Unit	20,55
		2.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur Kamtor	1.102 Unit	96 unit	96 Unit	100	423 Unit	38,38
		3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	58 Bulan	96,67
		4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan 6 unit kendaraan dinas	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	60 Bulan	100
		5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	57 Bulan	95
		VI.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah				100		100
		1.	Penyusunan dan Penetapan Program dan Kegiatan Bandiklatda Provinsi Lampung	Dokumen Perencanaan, Penetapan dan Pelaporan Program dan Kegiatan Bandiklatda	75 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100	60 Dokumen	100
		2.	Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	Badan Diklat Provinsi dan Badan Diklat Kab/Kota se Provinsi Lampung	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	100
Rata-rata Capaian Kinerja %								99,76		83,75
Predikat Kinerja								Sangat Tinggi		Tinggi

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pencapaian kinerja renja/program dan kegiatan tahun 2019 memiliki predikat kinerja sangat tinggi yaitu 99,76%, adapun pencapaian renja 2019 terhadap renstra secara keseluruhan sebesar 83,75% atau berpredikat tinggi. Hal ini disebabkan karena target kinerja keluaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BPSDM Provinsi Lampung Tahun 2015–2019 tidak semuanya dapat terakomodir kedalam Renja BPSDM Provinsi Lampung yang di *breakdown* per tahun. Beberapa faktor penyebab diantaranya ketersediaan anggaran Pemerintah Provinsi Lampung yang terbatas (yang disumbang oleh pemasukan PAD, Dana DAU, SILPA dsb) sehingga berdampak pada pagu indikatif masing-masing OPD, dimana OPD harus dapat memilih program dan target kegiatan yang prioritas untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh TPAD.

Selanjutnya, dapat kita ketahui bahwa dari 6 (enam) program yang dilaksanakan pada tahun 2019, terdapat 5 (lima) program yang mencapai kinerja sebesar 100%, adapun 1 (satu) program lainnya dibawah 100%, yaitu program **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** sebesar 99,15%, Berikut penjelasan pencapaian kinerja keuangan dan fisik program dan kegiatan tahun 2019 sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Sasaran 1: Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Aparatur

Pada sasaran ini terdiri dari satu program yaitu : **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 11 (Sebelas) kegiatan, dengan capaian realisasi keuangan pada triwulan IV sebesar Rp. **21.481.826.599,-** atau sebesar 95,19% dari Rp.**22.567.149.967,-**. Adapun realisasi fisik tercapai sebesar **99,15 %**. Rincian capaian realisasi per kegiatan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.292.079.000,- terealisasi Rp.292.047.363,- atau 99,99 %.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah PNS dan WI yang mengikuti diklat formal/bimtek/kursus/TOT/ lokakarya sebanyak 33 orang. Realisasi keluaran kegiatan sesuai yang ditargetkan yaitu: 33 PNS BPSDM Provinsi Lampung mengikuti diklat (100%).

2. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 783.976.000,- terealisasi Rp.774.201.200, atau 98,75 %, terdapat sisa Rp. 9.774.800,- dari belanja makan minum harian pegawai, penjilidan dan jasa narasumber.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah peserta diklat sebanyak 40 orang. Realisasi keluaran kegiatan yaitu sebanyak 40 orang PNS mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atau sebesar 100%.

3. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 1.567.952.000,- terealisasi Rp.1.560.730.000,- atau 99,54%, terdapat sisa Rp. 7.222.000,- dari belanja makan minum harian pegawai, penjilidan dan jasa narasumber.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah peserta diklat sebanyak 80 orang.

Realisasi keluaran kegiatan yaitu sebanyak 80 orang PNS mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung atau sebesar 100%.

4. Diklat Kepemimpinan Tingkat III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 1.717.464.000,-, terealisasi Rp.1.636.536.680, atau 95,29%, terdapat sisa Rp. 80.927.320,- dari belanja pakaian olahraga, dokumentasi, makan minum harian pegawai, penjilidan, perjalanan dinas luar daerah, dan jasa narasumber

Target keluaran (output) berupa: Jumlah peserta diklat sebanyak 80 orang. Realisasi keluaran yaitu sebanyak 73 orang PNS mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung atau sebesar 91,25% dikarenakan 1 orang peserta meninggal dunia, 1 orang peserta sakit sehingga mengundurkan diri dan ada 5 kuota peserta yang tidak terpenuhi.

5. Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 168.056.000,- terealisasi Rp.167.685.927,- atau 99,78 %, terdapat sisa Rp. 370.073,- dari belanja perjalanan dinas luar daerah.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah peserta diklat sebanyak 60 orang. Realisasi keluaran kegiatan sebanyak 60 orang PNS mengikuti Pengembangan

Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan atau sebesar 100%.

6. Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 77.103.000,- terealisasi Rp. 75.848.638,- atau 98,37%, terdapat sisa Rp. 1.254.362,- dari belanja perjalanan dinas luar daerah dan jasa narasumber.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah peserta diklat sebanyak 30 orang. Realisasi keluaran kegiatan sebanyak 30 orang PNS mengikuti Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar atau sebesar 100%.

7. Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Penunjang

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 173.944.000,-, terealisasi Rp.168.339.457,- atau 96,78% terdapat sisa Rp. 5.604.543,- dari ATK dan belanja perjalanan dinas.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah peserta diklat sebanyak 60 orang. Realisasi keluaran kegiatan sebanyak 60 orang PNS mengikuti Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Penunjang atau sebesar 100%..

8. Pengembangan Kompetensi Umum

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 436.620.000,-, terealisasi Rp.378.567.475,- atau 86,70%, terdapat sisa Rp. 58.052.525,- dari belanja ATK, dokumentasi, obat-obatan, sewa gedung, makan minum harian pegawai, perjalanan dinas dan jasa narasumber.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah peserta diklat sebanyak 120 orang. Realisasi keluaran yaitu sebanyak 120 orang PNS mengikuti Pengembangan Kompetensi Umum atau sebesar 100.

9. Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 301.580.000,-, terealisasi Rp.277.659.638,- atau 92,07%, terdapat sisa Rp. 23.920.362,- dari belanja ATK, dokumentasi, obat-obatan, cetak, sewa gedung, atribut kelengkapan pakaian dinas, perjalanan dinas dan jasa narasumber.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah peserta diklat sebanyak 90 orang. Realisasi keluaran kegiatan 90 orang PNS mengikuti Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi atau sebesar 100%.

10. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 759.559.967,- terealisasi Rp.720.199.390,- atau sebesar 94,82%, terdapat sisa Rp. 39.360.577,- dari belanja ATK,

dokumentasi, cetak, penggandaan, sewa gedung, makan minum harian pegawai, atribut kelengkapan pakaian dinas, perjalanan dinas dan jasa narasumber.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah peserta diklat sebanyak 160 orang. Realisasi keluaran kegiatan 160 orang peserta mengikuti Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional atau sebesar 100%.

11) Diklat Prajabatan Golongan III CASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Lampung

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 16.288.816.000,- terealisasi Rp.15.430.010.831,- atau sebesar 94,73%, terdapat sisa Rp. 858.805.169,- dari belanja ATK, dokumentasi, cetak, penggandaan, penjilidan, sewa gedung, makan minum harian pegawai, pakaian olahraga, atribut kelengkapan pakaian dinas, perjalanan dinas dan jasa narasumber.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah peserta diklat sebanyak 2228 orang. Realisasi keluaran kegiatan 1.610 orang peserta mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III CASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Lampung dan 605 orang mengikuti atau 91,25% dikarenakan ada kuota 13 orang peserta yang tidak terpenuhi dari Kab/Kota.

Sasaran 2: **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi**

Pada sasaran ini, terdiri dari 1 (Satu) program yaitu **Program Pembinaan dan pengembangan aparatur** yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. **241.016.250,-** atau sebesar 95,90% dari Rp. **251.317.409,-**. Adapun realisasi fisik tercapai s.d triwulan IV sebesar 100%. Rincian capaian realisasi per kegiatan sebagai berikut:

1. Penerbitan Majalah/Buletin Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 50.983.986,- terealisasi Rp.48.046.786,-atau sebesar 94,24%, terdapat sisa Rp. 2.937.200,- dari perjalanan dinas.

Target keluaran (output) berupa: 240 ekslembar buletin. Realisasi keluaran kegiatan yaitu: 240 ekslembar atau sebesar 100%.

2. Lembaga Sertifikasi Profesi

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 114.890.760,- terealisasi Rp.109.547.023,- atau sebesar 95,35% terdapat sisa Rp. 5.343.737,- dari belanja perjalanan dinas dan kursus singkat/pelatihan.

Target keluaran (output) berupa: bimtek/workshop Asesor LSPDN Provinsi Lampung sebanyak 30 orang. Realisasi keluaran kegiatan yaitu: 30 orang mengikuti bimtek/workshop Asesor atau sebesar 100%.

3. Komite Lembaga Penjamin Mutu Diklat

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 49.849.886,- terealisasi Rp.47.834.286,- atau 95,96% terdapat sisa Rp. 2.015.600,- dari belanja perjalanan dinas.

Target keluaran (output) berupa: Pelaksanaan komite penjamin mutu diklat di 4 Kab/Kota. Realisasi keluaran kegiatan sebanyak 4 Kab/Kota Pelaksanaan komite penjamin mutu diklat atau sebesar 100%.

4. Peningkatan Kemampuan Penelitian Widyaiswara

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 35.592.777,- terealisasi Rp. 35.588.155,- atau 99,99% terdapat sisa Rp. 4.622,- dari belanja perjalanan dinas. Target keluaran (output) berupa: sosialisasi karya tulis ilmiah 1 kali. Realisasi keluaran kegiatan sebanyak 1 kali sosialisasi atau sebesar 100%.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan kapabilitas kelembagaan

Pada sasaran ini, terdiri dari 4 (Empat) program yang terkandung yaitu Program Pelayanan administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, laporan realisasi anggaran per-semester dan laporan keuangan akhir tahun, Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 14 (Empat belas) kegiatan, dengan capaian realisasi keuangan pada triwulan IV sebesar Rp.2.154.112.362,- atau sebesar **98,25** % dari Rp. **2.192.444.591,-**. Adapun realisasi fisik tercapai sebesar 100%. Rincian capaian realisasi per kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 745.590.016,- terealisasi Rp.721.861.369,- atau 96,82%, terdapat sisa Rp. 23.728.647,- dikarenakan pembayaran telepon, air/PDAM dan listrik sesuai dengan pemakaian.

Target keluaran (output) berupa Pembayaran telepon, air/PDAM dan listrik selama 12 bulan. Realisasi keluaran kegiatan yaitu 12 bulan Pembayaran telepon, air/PDAM dan listrik (100%).

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 509.379.892,- terealisasi Rp.505.379.892,- atau 99,21%, terdapat sisa Rp. 4.000.000 dari Pembayaran honor PPTK dan honor PTHL

Target keluaran (output) berupa Pembayaran honor tim pengadaan barang jasa, tim pemeriksa barang jasa, pengelola keuangan SKPD dan tim pengurus barang selama 12 bulan yang belum digunakan.

Realisasi keluaran kegiatan sebesar 12 bulan Pembayaran honor tim pengadaan barang jasa, tim pemeriksa barang jasa, pengelola keuangan SKPD dan tim pengurus barang (100%).

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 186.450.000,- terealisasi Rp.186.300.000,- atau 99,92 % terdapat sisa Rp. 150.000.

Target keluaran (output) berupa Pembayaran honor cleaning service selama 12 bulan.

Realisasi keluaran kegiatan sebesar 12 bulan Pembayaran honor cleaning service (100%).

4. Penyediaan alat tulis kantor

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 26.566.802,- terealisasi Rp.26.537.150,- atau 99,89%, terdapat sisa Rp. 29.652,- dari pembelian alat tulis kantor.

Target keluaran (output) berupa pembelian alat tulis kantor selama 12 bulan.

Realisasi keluaran kegiatan sebesar 12 bulan pembelian alat tulis kantor (100%).

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 34.316.500,- terealisasi Rp.34.316.500,- atau 100%.

Target keluaran (output) berupa Pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan pengadaan selama 12 bulan. Realisasi keluaran kegiatan sebesar 12 bulan Pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan pengadaan (100%).

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 60.744.440,- terealisasi Rp.60.737.600,- atau 99,99%, terdapat sisa Rp. 6.840,- dari belanja alat listrik/elektronik.

Target keluaran (output) berupa Pembelian alat listrik/elektronik selama 12 bulan.

Realisasi keluaran kegiatan sebesar 12 bulan Pembelian alat listrik/elektronik (100%).

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 53.500.000,- terealisasi Rp.52.254.350,- atau 97,67% terdapat sisa Rp. 1.245.650,- dari anggaran Pembelian BBM.

Target keluaran (output) berupa Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan. Realisasi keluaran kegiatan sebesar 12 bulan (100%).

8. Penyediaan peralatan rumah tangga

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 33.888.816,- terealisasi Rp.33.875.700,- atau 99,96% terdapat sisa Rp. 13.116,- dari Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

Target keluaran (output) berupa Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 12 bulan.

Realisasi keluaran kegiatan yaitu 12 bulan Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih (100%).

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.19.080.000,- terealisasi Rp.19.080.000,- atau 100%.

Target keluaran (output) berupa Pembelian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan. Realisasi keluaran kegiatan yaitu 12 bulan Pembelian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (100%).

10. Penyediaan makanan dan minuman

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 59.580.000,- terealisasi Rp.59.580.000,- atau 100%.

Target keluaran (output) berupa Pelaksanaan penyediaan makanan dan minuman rapat/seminar selama 12 bulan.

Realisasi keluaran kegiatan yaitu 12 bulan Pelaksanaan penyediaan makanan dan minuman rapat/seminar (100%).

11. Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 205.140.000,- terealisasi Rp.205.126.055,- atau 99,99% terdapat sisa Rp. 13.945,- dari perjalanan dinas luar daerah.

Target keluaran (output) berupa Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi luar daerah sebanyak 25 kali. Realisasi keluaran kegiatan yaitu 25 kali Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi luar daerah (100%).

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah se-Provinsi Lampung
Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 93.920.000,- terealisasi Rp.93.682.627,- atau 99,75% terdapat sisa Rp. 237.373,- dari perjalanan dinas dalam daerah.
Target keluaran (output) berupa Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi dalam daerah sebanyak 35 kali. Realisasi keluaran kegiatan yaitu 35 kali Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi dalam daerah (100%).
13. Pameran dan Promosi Pembangunan
Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 142.896.125,- terealisasi Rp.133.989.119,- atau sebesar 93,77% terdapat sisa Rp. 8.907.006,- dari ATK, Dokumentasi, bahan baku bangunan, penggandaan dan sewa gedung/tempat.
Target keluaran (output) berupa Pelaksanaan pameran dan pawai kendaraan sebanyak 2 paket. Realisasi keluaran kegiatan yaitu 2 paket Pelaksanaan pameran atau sebesar 100%.
14. Penyediaan Bahan Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan
Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 21.392.000,- terealisasi Rp.21.392.000,- atau 100%.
Target keluaran (output) berupa penyusunan bahan Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan selama 12 bulan. Realisasi keluaran kegiatan yaitu 12 bulan penyusunan bahan Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan (100%).

Sedangkan **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** terdiri dari 5 (Lima) kegiatan, dengan capaian realisasi keuangan pada triwulan IV sebesar Rp. **834.594.582,-** atau sebesar 99,62% dari Rp.**837.810.000,-**. Adapun realisasi fisik tercapai sebesar 100%. Rincian capaian realisasi per kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 252.140.000,- terealisasi Rp.251.800.000,- atau sebesar 99,87%.
Target keluaran (output) berupa: Belanja jasa Instalasi/Pemasangan jaringan internet sebanyak 1 unit, pengadaan AC 15 unit, pengadaan Laptop 5 unit, pengadaan printer dan scanner 10 unit, pengadaan alat jaringan internet 1 paket, pengadaan proyektor 4 unit dan layar proyektor 4 unit. Realisasi keluaran kegiatan yaitu 1 unit jasa Instalasi/Pemasangan jaringan internet, 15 unit AC, 5 unit Laptop, 10 unit printer dan scanner, 1 paket alat jaringan internet, 4 unit proyektor dan 4 unit layar proyektor, atau sebanyak 100 %.

2. Pengadaan Meubeleur

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 210.000.000,- terealisasi sebesar Rp.208.800.000,- atau sebesar 99,43%.

Target keluaran (output) berupa: 16 unit pengadaan meja belajar bundar, 80 unit pengadaan kursi belajar. Realisasi keluaran kegiatan yaitu pengadaan meja belajar bundar 16 unit dan pengadaan kursi belajar 80 unit atau sebesar 100%.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 140.052.000,- terealisasi Rp.140.052.000,- atau 100%.

Target keluaran (output) berupa jumlah pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan. Realisasi keluaran kegiatan yaitu 12 bulan pemeliharaan gedung kantor (100%).

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 144.918.000,- terealisasi Rp.143.242.582,- atau 98,84%, terdapat sisa Rp. 1.675.418,- dari pembelian BBM dan Pembayaran STNK kendaraan.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah Pemeliharaan 6 unit kendaraan dinas (service 3 kendaraan, penggantian suku cadang 3 kendaraan, pembelian BBM, Pembayaran STNK kendaraan, Pembelian ban dan pembelian Accu) selama 12 bulan.

Realisasi keluaran kegiatan yaitu 12 bulan Pemeliharaan 6 unit kendaraan dinas (service 3 kendaraan, penggantian suku cadang 3 kendaraan, pembelian BBM, Pembayaran STNK kendaraan, Pembelian ban dan pembelian Accu) (100%).

5. Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 90.700.000,- terealisasi sebesar Rp.90.700.000,- atau 100%.

Target keluaran (output) berupa Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor selama 12 bulan.

Realisasi keluaran kegiatan sesuai yang ditargetkan yaitu 12 bulan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (100%).

Untuk **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** didukung melalui pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan, dimana realisasi keuangan pada triwulan IV tercapai sebesar Rp.**48.472.389,-** atau sebesar

96,47 % dari Rp. **50.245.263,-**. Adapun realisasi fisik tercapai sebesar 100%. Rincian capaian realisasi per kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan Keuangan

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 8.880.113,- terealisasi sebesar Rp.8.880.113,- atau 100%.

Target keluaran (output) berupa: 12 dokumen laporan keuangan yaitu laporan keuangan bulanan, semesteran, triwulan dan tahunan. Realisasi keluaran kegiatan yaitu: 12 dokumen laporan keuangan (100%).

2. Penyusunan Renstra

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 34.272.000,- terealisasi sebesar Rp.33.676.876,- atau 98,26% terdapat sisa Rp. 595.124,- dari ATK dan perjalanan dinas luar daerah.

Target keluaran (output) berupa: 1 dokumen Renstra. Realisasi keluaran kegiatan yaitu: 1 dokumen Renstra (100%).

3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 7.093.150,- terealisasi Rp. 5.915.400,-, atau 83,40% terdapat sisa Rp. 595.124,- dari ATK dan Belanja Cetak dan penggandaan.

Target keluaran (output) berupa: 32 dokumen laporan (LPPD, LKPJ, LKJ, Evaluasi Program diklat, Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD per triwulan, Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan bulanan, triwulan dan Semesteran, PK dan PK perubahan). Realisasi keluaran kegiatan yaitu: 32 dokumen laporan (100%).

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dukungan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, dengan capaian realisasi keuangan pada triwulan II sebesar Rp.**171.861.285,-** atau sebesar **99,25%** dari Rp.**173.160.770,-**. Adapun realisasi fisik tercapai sebesar 100%. Rincian capaian realisasi per kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penetapan Program dan Kegiatan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 149.304.645,- terealisasi Rp.149.186.835,- atau 99,92 % terdapat sisa Rp. 117.810,- dari ATK dan perjalanan dinas luar daerah.

Target keluaran (output) berupa penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 15 dokumen (Renja, KUA PPAS, KUA PPAS-P, RKA, RKA-P, DPA, DPA-P,

Buku Program dan kegiatan, Leaflet, SOP, Laporan AKD, ROK, RAK, RKT, Dokumen Laporan Pengembangan, Rencana Aksi, Evaluasi Rencana Aksi).

Realisasi keluaran kegiatan yaitu 15 dokumen (Renja, KUA PPAS, KUA PPAS-P, RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, Buku Program dan kegiatan, Leaflet, SOP, Laporan AKD, ROK, RAK, RKT, Dokumen Laporan Pengembangan, Rencana Aksi, Evaluasi Rencana Aksi) (100%).

2. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 23.856.125,- terealisasi Rp.22.674.450,- atau 95,05%, terdapat sisa dana Rp. 1.181.675,- dikarenakan adanya efisiensi dari perjalanan dinas luar daerah.

Target keluaran (output) berupa penyusunan dokumen hasil musrenbang sebanyak 1 dokumen. Realisasi keluaran kegiatan sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 1 dokumen (100%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, mempunyai tugas pokok ***"Melaksanakan Pengembangan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."***

Adapun Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;

- b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
- d1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas, Kinerja pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung meliputi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dan melaksanakan program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Perencanaan pembangunan daerah.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019, indikator kinerja yang ditetapkan telah merujuk pada indikator-indikator yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur berbasis kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, yaitu:

1. Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi dengan ketentuan Predikat memuaskan
2. Persentase penilaian performance tenaga pengajar dan penyelenggara pengembangan Kompetensi minimal baik

Adapun Kinerja pelayanan yang dilakukan BPSDM Provinsi Lampung tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	2019			Keterangan
				Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Aparatur	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi dengan ketentuan Prediklat memuaskan	Persentase	90	100	111,11	Sangat baik
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi	Persentase penilaian performance tenaga pengajar dan penyelenggara pengembangan Kompetensi minimal baik	Persentase	100	100	100	Sangat baik

1. Sasaran Meningkatkan Pengembangan Kompetensi Aparatur

Sasaran meningkatnya pengembangan kompetensi aparatur didukung oleh Indikator Kinerja Sasaran yaitu: Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi dengan ketentuan Prediklat memuaskan.

Tabel 2.3 Target dan Capaian Realisasi Sasaran 1

Sasaran	Indikator	Satuan	2019			Target Akhir RPJMD/ Renstra 2019	Capaian 2019 terhadap 2019 (%)
			Tar get	Realisasi	%		
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Aparatur	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi dengan ketentuan Prediklat memuaskan	Persentase	90	100	111,11	90	111,11

Pada tabel diatas terlihat bahwa target yang ingin dicapai pada tahun 2019 untuk indikator Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi dengan ketentuan Prediklat memuaskan sebesar 90%.

Adapun kinerja indikator sasaran tersebut didapat melalui penilaian persentase peserta diklat prajabatan, diklat kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis inti, teknis umum dan teknis fungsional yang lulus dengan predikat memuaskan dimana dari 193 orang peserta diklat kepemimpinan dan 2215 orang peserta diklat prajabatan, 520 orang peserta pengembangan kompetensi teknis inti dan teknis umum serta 160 orang peserta pengembangan kompetensi jabatan fungsional seluruhnya lulus dengan predikat memuaskan atau sebanyak 2928 orang peserta (100%), nilai tersebut melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 90%. Secara keseluruhan capaian sasaran strategis meningkatnya pengembangan kompetensi aparatur sebesar 111,11%.

2. Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi

Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi didukung oleh 1 (satu) Indikator Sasaran yaitu Persentase penilaian performance tenaga pengajar dan penyelenggara pengembangan Kompetensi minimal baik.

Tabel 2.4 Target dan Capaian Realisasi Sasaran 2

Sasaran	Indikator	Satuan	2019			Target Akhir RPJMD/ Renstra 2019	Capaian 2019 terhadap 2019 (%)
			Tar Get	realisasi	%		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi	Persentase penilaian performance tenaga pengajar dan penyelenggara pengembangan Kompetensi minimal baik	Persentase	100	100	100	100	100

Pada tabel diatas terlihat bahwa target yang ingin dicapai pada tahun 2019 untuk indikator sasaran persentase penilaian *performance* tenaga pengajar dan penyelenggara pengembangan Kompetensi minimal baik sebesar 100%. Adapun kinerja indikator sasaran tersebut di tahun 2019, didapat melalui perhitungan persentase kinerja tenaga pengajar dan penyelenggara minimal baik/memuaskan yang dinilai oleh peserta selama pelaksanaan diklat. Adapun hasil dari perhitungan didapat pencapaian target di 2019 sebesar 100%.

2.3 Isu – isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Tingkat kinerja pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahun bersangkutan. Dalam penentuan serta pelaksanaan program dan kegiatan, terjalin koordinasi dan sinergi dengan kabupaten/kota. Koordinasi dan sinergi yang dilakukan, selain untuk menjangkau usulan program dan kegiatan pada musrenbang RKPD, juga dilakukan kegiatan pembinaan kediklatan, pengelolaan kelembagaan dan pengembangan kompetensi aparatur, dimana BPSDM Provinsi Lampung melakukan monitoring pelaksanaan diklat dan mensosialisasikan peraturan-peraturan terkini terkait diklat. Disamping itu pada pelaksanaan kegiatan diklat, baik itu diklat teknis dan fungsional, diklat prajabatan maupun diklat kepemimpinan, koordinasi terjalin secara terus-menerus baik dengan kabupaten/kota maupun dengan BPSDM Kemendagri serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi Pembina lembaga diklat.

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi yang tertuang dalam program dan kegiatan tahun 2019, terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi antara lain:

1. Anggaran

- a. Ketersediaan anggaran yang dapat dialokasikan untuk peningkatan kompetensi aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung belum sebanding dengan jumlah aparatur yang ada, mengingat para ASN mempunyai hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi setiap tahunnya, sebagaimana telah diatur oleh UU Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pada pasal 203 ayat 4 bahwa ASN mempunyai hak untuk mengembangkan kompetensinya minimal 20 jam pelajaran (JP) pertahun;
- b. Adanya Rasionalisasi/efisiensi anggaran oleh Pemerintah Provinsi Lampung mengakibatkan beberapa target kegiatan berkurang, selain itu juga akibat efisiensi tersebut terdapat satu kegiatan diklat yang tidak jadi dianggarkan/ditiadakan di perubahan APBD yaitu Diklat Teknis bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi ASN OPD Provinsi Lampung pada kegiatan pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi Non pelayanan dasar.

2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- a. Sistem pelaporan dan evaluasi program yang belum optimal secara internal, sehingga data kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Lampung belum terkelola dengan baik;
- b. Kinerja Sumber daya manusia BPSDM Provinsi Lampung yang belum optimal dan jumlah yang kurang memadai menjadi salah satu faktor penghambat efektifitas pencapaian kinerja, selain itu masih kurangnya motivasi kerja dan tingkat kedisiplinan SDM sehingga perlu pembinaan intensif dari atasan.

Adapun solusi pemecahan masalah baik permasalahan anggaran dan program yang sedang dan akan terus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan upaya peningkatan anggaran diklat yang masih terbatas dalam forum pembahasan anggaran dimana sesuai , dan pada tahun 2020 anggaran diklat untuk PNS Pemerintah Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 37,37%.
2. Terkait rasionalisasi/efisiensi anggaran kedepannya BPSDM Provinsi Lampung mengupayakan agar anggaran untuk kediklatan tidak mengalami rasionalisasi/efisiensi anggaran.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas dengan instansi pembina diklat yaitu BPSDM Kemendagri dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan terkait baik itu diklat ataupun kegiatan lainnya;
4. Melakukan perbaikan dan pengembangan kapasitas kelembagaan melalui upaya perbaikan tata laksana (*business process*), optimalisasi organisasi (*rightsizing*), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana;
5. Meningkatkan kapasitas SDM BPSDM Provinsi Lampung melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan kursus.

Secara operasional, program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung harus mendukung tercapainya tujuan dan arah pembangunan Kepala Daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019 – 2024. BPSDM Provinsi Lampung beserta OPD lainnya memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan efektivitas pemerintah dengan menciptakan sistem kerja berbasis

kinerja dan kompetensi sesuai dengan agenda kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Berangkat dari hal tersebut diatas, maka perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2021 direncanakan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengembangan kompetensi SDM aparatur dan non aparatur di Provinsi Lampung, serta meningkatkan kualitas tenaga pengajar/widyaiswara BPSDM Provinsi Lampung sendiri, peningkatan mutu kualitas penyelenggaraan diklat dan sarana prasarana penunjang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tema dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 (dalam proses penyusunan), yaitu: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur Menuju Lampung Berjaya; dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
4. Reformasi Birokrasi
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tahun 2021 memuat program/kegiatan pembangunan yang mengacu pada Renstra BPSDM Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Prioritas pembangunan Provinsi Lampung tahun 2021 yang menjadi sasaran Renja BPSDM Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah Reformasi Birokrasi. Salah satu area dalam Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Sumberdaya Manusia Aparatur dan sesuai dengan tugas BPSDM yaitu “Melaksanakan Pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka BPSDM Provinsi Lampung berkewajiban melaksanakan pengembangan kompetensi ASN di Pemerintahan Provinsi Lampung agar tercipta peningkatan kompetensi ASN guna terwujudnya peningkatan pelayanan publik di Provinsi Lampung dalam rangka tercapainya reformasi birokrasi.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

BPSDM Provinsi Lampung dalam penyusunan program kegiatan, memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku yang berkepentingan terkait dengan pengembangan sumber daya aparatur yang termuat dalam pokok pikiran (Pokir) DPRD. Apabila terdapat Pokir DPRD yang masuk dalam kewenangan tugas fungsi BPSDM maka BPSDM Provinsi Lampung perlu mengakomodir Pokir tersebut dalam Renja 2021.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan pada Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, dimana pada penyusunan Renja 2021 ini, BPSDM Provinsi Lampung mengacu pada Renstra tahun 2019 - 2024. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2021 adalah : **“Terwujudnya Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur yang Efektif.”**

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran lebih rinci tentang langkah-langkah yang diambil oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, program yang direncanakan berjumlah sebanyak 8 (delapan) buah sedangkan kegiatan sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah. Penggambaran lebih lanjut program dan kegiatan tahun 2021 beserta kebutuhan anggaran disajikan pada Matriks Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tahun 2021, merupakan dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJM Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024, untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Tahun 2021.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, dan dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder pengembangan SDM dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Dengan adanya rencana kerja ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup pemerintah Provinsi Lampung maupun dengan pemerintah Kabupaten/Kota, serta dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**



Hi. KHERLANI, SE., MM
Pembina Utama
NIP. 19620504 198103 1 004

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Daerah Provinsi Lampung

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (kegiatan lanjutan/ alternatif/baru, atau keterangan lainnya)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi (Kab/Kota/Kec/ Desa/Kel)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (APBD/APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran		100%	3.428.738.197			100%	3.788.755.708
	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	· Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Hajimena	100%	776.968.200	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	100%	858.549.861
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	· Layanan administrasi keuangan	Hajimena	100%	759.229.200	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	100%	838.948.266
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	· Layanan Kebersihan Kantor	Hajimena	100%	220.495.770	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	100%	243.647.826
	4. Penyediaan alat tulis kantor	· Jumlah Pengadaan ATK	Hajimena	2264 Buah	35.478.000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	2604 Buah	39.203.190
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	· Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Hajimena	90696 Lembar	47.304.000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	104300 Lembar	52.270.920
	6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	· Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hajimena	2377 Unit	76.053.006	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	2734 Unit	84.038.572
	7. Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	· Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Hajimena	1993 Buah	175.949.593	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	2292 Buah	194.424.300
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	· Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Hajimena	5550 Buah	70.956.000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	5575 Buah	78.406.380
	9. Penyediaan makanan dan minuman	· Jumlah Layanan Makan dan Minum	Hajimena	67 Kali	82.521.828	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	77 Kali	91.186.620
	10. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi	· Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Hajimena	106 Kali	768.690.000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	124 Kali	849.402.450
	11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	· Jumlah Tenaga PTHL	Hajimena	15 Orang	415.092.600	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	12 Orang	458.677.323
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor		100%	1.661.830.911			100%	1.836.323.157
	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	· Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Hajimena	246 Unit	1.118.286.664	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	271 Unit	1.235.706.764
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	· Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Hajimena	41 Unit	219.727.080	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	45 Unit	242.798.423

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (kegiatan lanjutan/ alternatif/baru, atau keterangan lainnya)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi (Kab/Kota/Kec/ Desa/Kel)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (APBD/APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	· Jumlah rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Hajimena	6 Unit	176.760.857	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	6 Unit	195.320.747
	4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	· Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Hajimena	277 Unit	147.056.310	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	305 Unit	162.497.223
III.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah		100%	675.126.236			100%	746.014.491
	1. Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	- jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Hajimena	95 Orang	620.865.000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	115 Orang	686.055.825
	2. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	- Jumlah Dokumen Pemutakhiran Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan dan lain-lain	Hajimena	23 Dokumen	54.261.236	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	26 Dokumen	59.958.666
IV.	Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan		100%	756.324.406			100	830.488.469
	1. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Hajimena	20 Dokumen	42.885.806	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	20 Dokumen	47.388.816
	2. Penyusunan Laporan Keuangan	- Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian keuangan SKPD	Hajimena	12 Dokumen	65.043.000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	12 Dokumen	71.872.515
	3. Penyusunan Dokumen Perencanaan	- Jumlah Dokumen Perencanaan	Hajimena	18 Dokumen	286.520.000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	18 Dokumen	311.354.600
	4. Pengembangan e-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	- Implementasi aplikasi e-Government dan pameran	Hajimena	2 Paket	337.041.000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	2 Paket	372.430.305
	5. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	- Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Hajimena	55 Dokumen	24.834.600	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	61 Dokumen	27.442.233
V.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Manajerial dengan predikat memuaskan		100%	6.408.788.057			100%	7.081.684.747

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (kegiatan lanjutan/ alternatif/baru, atau keterangan lainnya)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi (Kab/Kota/Kec/ Desa/Kel)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (APBD/APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Hajimena	430 Orang	5.616.160.000	APBD	Kegiatan Baru	525 Orang	6.217.120.000
	2. Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Daerah	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Hajimena	120 Orang	515.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	120 Orang	540.000.000
	3. Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Hajimena	58 Orang	277.628.057	APBD	Kegiatan Lanjutan	58 Orang	324.564.747
VI.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Inti	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Teknis Inti dengan hasil post test minimal 70		100%	1.631.957.775			100%	1.803.306.706
	1. Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Hajimena	120 Orang	543.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	120 Orang	600.000.000
	2. Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Hajimena	120 Orang	543.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	120 Orang	603.306.706
	3. Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Penunjang	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Hajimena	120 Orang	545.957.775	APBD	Kegiatan Lanjutan	120 Orang	600.000.000
VII.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum dan Fungsional	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Teknis Umum dan Fungsional dengan hasil post test minimal 70		100%	2.625.327.377			100%	2.900.971.657
	1. Pengembangan Kompetensi Umum	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Hajimena	120 Orang	813.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	120 Orang	913.000.000
	2. Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Hajimena	120 Orang	612.327.377	APBD	Kegiatan Lanjutan	120 Orang	712.327.377

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (kegiatan lanjutan/ alternatif/baru, atau keterangan lainnya)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi (Kab/Kota/Kec/ Desa/Kel)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (APBD/APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Hajimena	300 Orang	1.200.000.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	320 Orang	1.275.644.280
VIII.	Pembinaan, pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan diklat sesuai standar		100%	600.702.370			100%	663.773.677
	1. Uji Kompetensi dan peningkatan kapasitas asesor	- Jumlah peserta uji kompetensi	Hajimena	100 Orang	295.650.000	APBD	Kegiatan Baru	100 Orang	326.693.250
	2. Pengelolaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas WI	- Jumlah pelaksanaan KPMD, akreditasi dan karya ilmiah WI	Hajimena	15 Kali	184.485.600	APBD	Kegiatan Baru	18 Kali	203.856.588
	3. Kerjasama dan penyediaan sumber belajar	- Jumlah dokumen kerjasama, buletin dan pembelajaran	Hajimena	400 Buah	120.566.770	APBD	Kegiatan Baru	450 Buah	133.223.839
TOTAL					17.788.795.329				19.651.318.611

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**



Hi. KHERLANI, SE, MM

Pembina Utama

NIP. 19620504 198103 1 004

TABEL USULAN PADA DATABASE PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

NAMA OPD : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DOKUMEN RENSTRA OPD		USUL KE DATABASE PERMENDAGRI NO. 90/2019									
NO. REKENING (sesuai database aplikasi)	URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN (sesuai database aplikasi)	NO. REKENING URUSAN PEMERINTAHAN (sesuai Permendagri)	NOMENKELATUR URUSAN PEMERINTAHAN (sesuai Permendagri)	NO. REKENING BIDANG URUSAN (sesuai Permendagri)	NOMENKELATUR BIDANG URUSAN (sesuai Permendagri)	NO. REKENING PROGRAM (sesuai Permendagri)	NOMENKELATUR PROGRAM (sesuai Permendagri)	NO. REKENING KEGIATAN (sesuai Permendagri)	NOMENKELATUR KEGIATAN (sesuai Permendagri)	NO. REKENING SUB KEGIATAN	NOMENKELATUR SUB KEGIATAN (sesuai USULAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	URUSAN PEMERINTAHAN : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.04	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
						5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
4.04.4.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							5.04.01.1.03	Administrasi Umum		
4.04.4.04.01.01. 01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									5.04.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.04.4.04.01.01. 02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan									5.04.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.04.4.04.01.01. 03	Penyediaan jasa kebersihan kantor									5.04.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.04.4.04.01.01. 05	Penyediaan alat tulis kantor									5.04.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.04.4.04.01.01. 06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									5.04.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.04.4.04.01.01. 07	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									5.04.01.1.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.04.4.04.01.01. 08	Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik									5.04.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										5.04.01.1.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.04.4.04.01.01. 09	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									5.04.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.04.4.04.01.01. 10	Penyediaan makanan dan minuman									5.04.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
4.04.4.04.01.01. 11	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi									5.04.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
4.04.4.04.01.01. 13	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran									5.04.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

DOKUMEN RENSTRA OPD		USUL KE DATABASE PERMENDAGRI NO. 90/2019									
NO. REKENING (sesuai database aplikasi)	URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN (sesuai database aplikasi)	NO. REKENING URUSAN PEMERINTAHAN (sesuai Permendagri)	NOMENKELATUR URUSAN PEMERINTAHAN (sesuai Permendagri)	NO. REKENING BIDANG URUSAN (sesuai Permendagri)	NOMENKELATUR BIDANG URUSAN (sesuai Permendagri)	NO. REKENING PROGRAM (sesuai Permendagri)	NOMENKELATUR PROGRAM (sesuai Permendagri)	NO. REKENING KEGIATAN (sesuai Permendagri)	NOMENKELATUR KEGIATAN (sesuai Permendagri)	NO. REKENING SUB KEGIATAN	NOMENKELATUR SUB KEGIATAN (sesuai USULAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.4.04.01.04.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset									5.04.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
4.04.4.04.01.16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial							5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
4.04.4.04.01.16.01	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan									5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
4.04.4.04.01.16.02	Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Daerah									5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
4.04.4.04.01.16.03	Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi									5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
4.04.4.04.01.17	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Inti							5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		
4.04.4.04.01.17.01	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan									5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
4.04.4.04.01.17.02	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar									5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
4.04.4.04.01.17.03	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Penunjang									5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

DOKUMEN RENSTRA OPD		USUL KE DATABASE PERMENDAGRI NO. 90/2019									
NO. REKENING (sesuai database aplikasi)	URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN (sesuai database aplikasi)	NO. REKENING URUSAN PEMERINTAHAN (sesuai Permendagri)	NOMENKELATUR URUSAN PEMERINTAHAN (sesuai Permendagri)	NO. REKENING BIDANG URUSAN (sesuai Permendagri)	NOMENKELATUR BIDANG URUSAN (sesuai Permendagri)	NO. REKENING PROGRAM (sesuai Permendagri)	NOMENKELATUR PROGRAM (sesuai Permendagri)	NO. REKENING KEGIATAN (sesuai Permendagri)	NOMENKELATUR KEGIATAN (sesuai Permendagri)	NO. REKENING SUB KEGIATAN	NOMENKELATUR SUB KEGIATAN (sesuai USULAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.4.04.01.18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum dan Fungsional							5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		
								5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
4.04.4.04.01.18.01	Pengembangan Kompetensi Umum									5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
4.04.4.04.01.18.02	Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi									5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
4.04.4.04.01.18.03	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional									5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

DOKUMEN RENSTRA OPD		USUL KE DATABASE PERMENDAGRI NO. 90/2019									
NO. REKENING (sesuai database aplikasi)	URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN (sesuai database aplikasi)	NO. REKENING URUSAN PEMERINTAHAN (sesuai Permendagri)	NOMENKELATUR URUSAN PEMERINTAHAN (sesuai Permendagri)	NO. REKENING BIDANG URUSAN (sesuai Permendagri)	NOMENKELATUR BIDANG URUSAN (sesuai Permendagri)	NO. REKENING PROGRAM (sesuai Permendagri)	NOMENKELATUR PROGRAM (sesuai Permendagri)	NO. REKENING KEGIATAN (sesuai Permendagri)	NOMENKELATUR KEGIATAN (sesuai Permendagri)	NO. REKENING SUB KEGIATAN	NOMENKELATUR SUB KEGIATAN (sesuai USULAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.04.4.04.01.19	Program Pembinaan, pengembangan dan Pengelolaaan Kelembagaan							5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		
								5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
4.04.4.04.01.19.01	Uji Kompetensi dan peningkatan kapasitas asesor									5.04.02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
										5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
4.04.4.04.01.19.02	Pengelolaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas WI									5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
										5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
4.04.4.04.01.19.03	Kerjasama dan penyediaan sumber belajar									5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
										5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga